

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Parkir

Menurut PP No.43 Th.1993 dalam Warpani (2002), menjelaskan kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada saatnya harus berhenti(parkir), yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dalam keputusan Dirjen Perhubungan darat 1996, mendefinisikan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau untuk menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengemudi tersebut (Hoobs, 1995). Menurut Elfirah, (2019), Parkir Umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah atau lahan yang tidak dikuasai pemerintah daerah yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha atau perorangan.

2.2 Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah tempat parkir atau gedung parkir yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan diluar tepi jalan umum. Fasilitas parkir dapat diartikan sebagai lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan

kegiatan pada suatu kurun waktu. Tujuan dari Fasilitas Parkir adalah untuk menunjang kelancaran arus lalu-lintas, dan juga untuk memberikan tempat istirahat kendaraan (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996).

Menurut Hoobs (1995), Penyediaan tempat-tempat parkir menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam perencanaan transportasi. Dari segi lalu lintas, terkadang aktivitas dari parkir saat ini mengganggu kelancaran arus lalu lintas, dikarenakan kegiatan parkir yang banyak dilakukan di badan jalan, sehingga arus lalu lintas menjadi terhambat dan membuat penggunaan jalan menjadi tidak efektif.

Menurut Munawar (2004), dalam konsep dasar penyediaan fasilitas parkir, penyediaan fasilitas parkir kendaraan di perkotaan pada prinsipnya dapat dilakukan di badan jalan dan diluar badan jalan dengan persyaratan tertentu.

1. Konsep dasar penyediaan fasilitas parkir pada badan jalan

Guna ruas jalan suatu ruas jalan dari sisi pandang transportasi dapat dibagi dalam tiga bagian pokok yaitu :

- a. untuk keperluan pergerakan arus lalulintas kendaraan,
- b. untuk keperluan pergerakan arus lalulintas pejalan kaki,
- c. untuk keperluan berhenti atau parkir

2. Konsep dasar penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan

Pengendalian fasilitas parkir di luar badan jalan dapat berupa :

- a. pelataran atau taman parkir
- b. gedung parkir

yang dalam perencanaan dan perancangan fasilitas parkir tersebut, harus dipertimbangkan dari aspek lokasi, tapak (*site*), dan akses dari fasilitas parkir tersebut.

2.3 Karakteristik Parkir

Menurut Hobbs (1995), Untuk mengetahui dan merencanakan suatu lahan parkir yang di perlukan adalah karakteristik parkir. Beberapa parameter karakteristik parkir ditentukan dengan akumulasi parkir, durasi parkir, volume parkir, pergantian parkir (*turn over parking*), indeks parkir, dan kapasitas parkir.

2.4 Permasalahan Parkir

Dalam Munawar 2004, Aktivitas suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktivitas parkir kendaraan . Bangkitan Parkir ini akan menimbulkan masalah antara lain :

1. Bangkitan tidak dapat tertampung oleh fasilitas parkir diluar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas.
2. Tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir.

Kedua masalah parkir tesebut secara umum terjadi pada hamper semua ruas jalan, lebih-lebih daerah pertokoan dna perkantoran serta sekolah, yang mempunyai bangkitan parkir di badan jalan cukup besar.

2.5 Penentuan Kebutuhan Ruang Parkir

Menurut Tamin (2008) metode yang sering dipakai dalam menentuka kebutuhan lahan parkir, yaitu :

1. Metode berdasarkan kepemilikan kendaraan
2. Metode berdasarkan luas lantai bangunan
3. Metode berdasarkan selisih terbesar antara kedatangan dan keberangkatan kendaraan.

Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Departemen Jenderal Perhubungan Darat (1996), dalam penentuan kebutuhan parkir dibagi menjadi dua jenis peruntukan kebutuhan parkir, yaitu kegiatan parkir yang tetap dan kegiatan parkir yang bersifat sementara.

1. Kegiatan parkir yang tetap, seperti :

Pusat perkantoran swasta atau pemerintahan, pusat perdagangan, pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan, tempat rekreasi, sekolah, pasar , hotel dan tempat penginapan, rumah sakit

2. Kegiatan parkir yang bersifat sementara, seperti :

Bioskop, rumah ibadah, tempat pertunjukan, dan tempat pertandingan olahraga.

2.6 Survei Durasi Parkir

Menurut Munawar (2004), tujuan dilakukannya survei adalah untuk mendapatkan informasi tentang pola permintaan parkir. Informasi tersebut diperlukan dalam rangka perencanaan fasilitas parkir, struktur pentaripan parkir,

atau pengaturan parkir yang sudah ada. Dengan survai ini selain didapatkan data durasi, juga didapatkan data akumulasi parkir.

